

BAB II

KERJA SAMA EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA:

MENUJU KERJA SAMA IA-CEPA

Bab ini membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang menjadi landasan lahirnya *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Hubungan kedua tidak hanya didorong oleh faktor kedekatan geografis, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi yang saling melengkapi, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Untuk memahami arah dan konteks kerjasama tersebut, pembahasan diawali dengan analisis mengenai neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia, khususnya di sektor manufaktur. Selanjutnya, bab ini mengulas bentuk kerja sama yang telah terbangun sebelumnya, termasuk kerja sama ekonomi dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA).

Pembahasan ini penting untuk menunjukkan bagaimana integrasi ekonomi kawasan menjadi pondasi bagi peningkatan hubungan ekonomi bilateral. Namun, pada kerja sama tersebut masih terdapat beberapa pos tarif produk dari Indonesia yang masih belum mendapatkan komitmen dari pihak Australia, khususnya pada sub-sektor manufaktur seperti tekstil, otomotif, dan furnitur. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi pentingnya mengesahkan perjanjian IA-CEPA. Kemudian bagian terakhir dari bab ini membahas secara rinci proses negosiasi IA-CEPA, mulai dari latar belakang pembentukannya, kepentingan yang dibawa masing-masing pihak, dinamika perundingan, hingga terbentuknya

kesepakatan komprehensif yang menandai babak baru hubungan ekonomi Indonesia dan Australia. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hubungan ekonomi Indonesia dan Australia berkembang menjadi kemitraan strategis yang lebih luas dan saling menguntungkan melalui IA-CEPA.

2.1 Neraca Perdagangan antara Indonesia dan Australia di Sektor Manufaktur

Sejak krisis moneter 1998, sektor manufaktur di Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan daya saing dan menarik investasi baru dari luar. Terdapat banyak fasilitas produksi yang sudah usang dan tidak lagi kompetitif akibatnya minimnya penanaman modal di bidang ini. Meski begitu, terdapat indikasi bahwa sektor manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2011, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 6,2% dan terhadap ekspor sebesar 24,6%. Menjelang akhir tahun tersebut, hampir seluruh subsektor manufaktur mencatatkan pertumbuhan positif.³²

Kondisi serupa juga terjadi di Australia, di mana sektor manufaktur menghadapi tekanan dari penurunan produktivitas nasional, kenaikan biaya energi dan lainnya, nilai tukar dolar Australia yang tetap tinggi, persaingan global yang semakin ketat, serta melemahnya permintaan domestik. Kontribusi terhadap PDB turun dari 9,5% pada tahun 2005-2006 menjadi 8,7% pada tahun 2009-2010, sementara pada 2010-2011 sektor manufaktur mempekerjakan sektor 9% dari total tenaga kerja Australia.

³² Indonesia-Australia Business Council, "Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA," 2012, 1-100, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/ia-bpg-position-paper.pdf>.

Dalam kurun tahun 2007 hingga 2012, sektor manufaktur tercatat kehilangan sebanyak 106.775 pekerjaan dan diperkirakan sekitar 85.600 pekerjaan lagi dapat hilang dalam lima tahun berikutnya.³³

Dalam perdagangan, barang manufaktur (termasuk logam olahan) menyumbang sekitar 21% dari total ekspor Australia. Khususnya dalam hubungan dengan Indonesia, pangsa barang manufaktur mencapai sekitar 30% dari total ekspor barang, dengan nilai setara A\$1,5 miliar. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke Australia didominasi barang manufaktur yang mencakup sekitar 40% dengan nilai A\$2,1 miliar. Komoditas utama yang dikirim Indonesia meliputi kayu olahan sederhana (A\$149 juta), perangkat elektronik seperti monitor, proyektor, dan televisi (A\$114 juta), ban serta komponen lainnya (A\$104 juta), struktur dari besi, baja, dan aluminium (A\$95 juta), serta produk kertas dan karton (A\$74 juta). Sementara itu, ekspor utama Australia ke Indonesia di luar sektor agro-pangan terdiri dari barang manufaktur berbahan logam dasar (A\$71 juta), mesin khusus beserta komponennya (A\$65 juta), bubur kertas dan limbah kertas (A\$41 juta), serta peralatan untuk teknik sipil (A\$41 juta).³⁴

Australia menempati posisi sebagai salah satu dari sepuluh negara utama dengan tingkat investasi terbesar di Indonesia, menunjukkan perannya yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan hubungan perdagangan antara kedua negara. Pada tahun 2012, nilai total investasi Australia di Indonesia mencapai USD 743,6 juta. Sementara itu, volume perdagangan antara

³³ Indonesia-Australia Business Council. "Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA,"

³⁴ Indonesia-Australia Business Council. "Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA,"

Indonesia dan Australia pada tahun yang sama mencapai USD 10,2 miliar dengan komoditas utama yang diperdagangkan meliputi emas, kendaraan bermotor, baja, dan kayu. Bahkan, hingga Juni 2013 perdagangan kedua negara telah menghasilkan nilai sebesar USD 4,3 miliar dan diperkirakan pada tahun 2015 akan mencapai volume perdagangan sebesar USD 15 miliar. Mengutip dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan bahwa *“angka-angka tersebut belum menggambarkan potensi sepenuhnya yang mampu dihasilkan, dan kedepannya kita mampu meningkatkan kerja sama kedua negara”*.³⁵

Tabel 2. 1 Realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara 2012-2018 (Juta US\$)

Negara Investasi	Investasi (Juta US\$)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Singapura	4.856,40	4.670,80	5.832,10	5.901,18	9.178,70	8.441,60	9.193,18
Jepang	2.456,90	4.712,90	2.705,10	2.876,99	5.400,90	4.996,20	4.952,77
Korea Selatan	1.949,70	2.205,50	1.126,60	1.213,47	1.065,80	2.024,60	1.604,72
USA	1.238,30	2.435,80	1.299,50	893,16	1.161,90	1.992,80	1.217,62
Belanda	966,50	927,80	1.726,30	1.307,78	1.475,00	1.489,40	943,12
Inggris	934,40	1.075,80	1.587,90	503,22	306,70	774,80	271,13
Australia	743,60	226,40	647,30	167,97	174,70	513,90	597,44
Taiwan	646,90	402,60	114,70	107,95	149,10	39,00	210,22
Hongkong	309,60	376,20	657,20	937,20	2.248,30	2.116,50	2.011,42
R.R. Tiongkok	-	-	-	628,30	2.665,30	3.361,20	2.376,54

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan satu dekade terakhir (2012- Mei 2019).

³⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Pertemuan Bilateral Indonesia Dan Australia,” 2013, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2869/pertemuan-bilateral-indonesia-dan-australia>.

Untuk tahun 2018 Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan terhadap Australia yang sebesar USD 3,007 miliar, artinya Indonesia mengimpor produk migas dan non migas yang lebih besar dari Australia (USD 5,829 miliar) dibandingkan dengan ekspor ke Australia (USD 2,819 miliar).³⁶ Dengan diberlakukannya perjanjian kemitraan IA-CEPA, Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas melalui penghapusan menjadi 0%, sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor, terutama produk-produk dari industri manufaktur seperti tekstil, otomotif, furnitur, maupun komponen elektronik.³⁷

Tabel 2. 2 Neraca Perdagangan Indonesia-Australia 2011-2019 (Juta USD)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Perdagangan	10,760	10,203	9,409	10,595	8,518	8,469	8,532	8,644	2,980
Migas	2,508	1,766	1,606	1,408	851	1,270	1,547	1,321	351
Non-Migas	8,252	8,437	7,803	9,187	7,667	7,199	6,985	7,323	2,629
Ekspor	5,582	4,905	4,370	4,947	3,701	3,308	2,524	2,819	883
Migas	2,504	1,547	1,397	1,251	707	538	582	656	91
Non-Migas	3,078	3,358	2,973	3,696	2,994	2,769	1,942	2,163	791.6
Impor	5,177	5,297	5,038	5,646	4,815	5,161	6,009	5,825	2,098
Migas	3	219	209	156	144	732	965	665	260
Non-Migas	5,174	5,078	4,829	5,490	4,672	4,429	5,044	5,159	1,838
Neraca Perdagangan	405	-392	-668	-699	-1,114	-2,053	-3,485	-3,007	-1,215

Sumber: BPS, diolah pusat data dan sistem informasi Kemendag

Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar impor Indonesia dari Australia terdiri dari bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan industri, seperti gandum, batu bara, bijih besi, aluminium, seng, gula mentah, serta susu dan krim. Produk impor utama dari Australia antara lain gandum senilai USD 639,6

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, "Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (Juta US\$), 2012-2018," 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MyMy/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html>.

³⁷ Admin Ipotnews, "DPR Akhirnya Setujui RUU IA CEPA Jadi Undang - Undang," Ipotnews, 2020, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=DPR_Akhirnya_Setujui_RUU_IA_C_EPA_Jadi_Undang_Undang&news_id=115559&group_news=IPOTNEWS&news_date=&tagin_g_subtype=LAW&name=&search=y_general&q=UU&halaman=1.

juta, batu bara USD 632 juta, sapi hidup USD 573,9 juta, gula mentah atau tebu lainnya USD 314,7 juta, serta bijih besi dan bijih lainnya sebesar USD 209,3 juta. Meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan akibat impor produk-produk tersebut, kondisi ini tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kinerja perdagangan, melainkan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sektor industri dalam negeri dan pasokan bahan baku dari Australia. Hal ini karena sebagian besar barang yang diimpor merupakan bahan baku atau bahan penolong industri, yang kemudian diolah menjadi produk lanjutan dengan nilai tambah (*value added*) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.³⁸

Sementara itu, sektor manufaktur di Indonesia memiliki potensi yang besar, terutama dengan dukungan jumlah tenaga kerja yang melimpah dan keuntungan demografi. Pada tahun 2011, produksi besi dan baja tumbuh 15,03%, disusul industri tekstil, produk kulit, dan alas kaki yang meningkat 8,63%. Industri lain yang juga mencatat pertumbuhan antara lain kertas dan produk kertas (8,63%), makanan dan minuman (7,29%), serta otomotif (7,01%). Kementerian Perindustrian Indonesia menetapkan delapan sektor prioritas, yaitu baja, semen, petrokimia, keramik, kelistrikan dan peralatan listrik, mesin, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki. Dengan kehadiran perjanjian IA-CEPA dapat mendorong kerja sama di sektor manufaktur dan membangun rantai nilai lintas batas untuk menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat produksi berbiaya rendah, sementara perusahaan dari Australia dapat

³⁸ Rissy, "Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)."

berkontribusi pada aspek desain, teknologi dan pemasaran. Sejalan dengan tujuan utama Perjanjian IA-CEPA (*economic powerhouse*), menjadikan kawasan kedua negara menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk memperluas akses ke pasar negara ketiga.³⁹

2.2 Kerja sama Indonesia dan Australia

2.2.1 Kerja sama Ekonomi Indonesia dan Australia dalam Kerangka

AANZFTA

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement merupakan perjanjian perdagangan bebas regional yang beranggotakan negara-negara ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Perjanjian kerja sama ini pertama kali diusulkan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Thailand, Supachai Panitchpakdi, pada sebuah Konferensi Prospek Perdagangan dan Investasi Nasional yang diadakan di Melbourne pada November 1993. Usulan tersebut mengindikasikan adanya inisiatif atau upaya untuk mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan antara dua kerangka kerja sama atau kawasan perdagangan bebas, yakni *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA/CER)*. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mengamati potensi sinergi dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lintas kawasan, guna membangun hubungan ekonomi yang

³⁹ Indonesia-Australia Business Council, "Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA."

lebih baik dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi para anggota dan perekonomian di dua kawasan.⁴⁰

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, berdasarkan laporan Satuan Tugas Tingkat Tinggi Tahun 2000 yang berjudul “The Angkor Agenda”, pembentukan kawasan perdagangan bebas antara AFTA dan CER dinilai tidak hanya layak tetapi juga penting untuk membantu ASEAN dan CER mengimbangi pasar global.⁴¹ Pada bulan September 2002, para Menteri setiap negara anggota menandatangani perjanjian kemitraan yang diberi nama *Closer Economic Partnership* (CEP). Tujuannya sendiri yakni memperdalam tingkat integrasi ekonomi antara Australia-Selandia Baru dan negara-negara ASEAN melalui program yang lebih difokuskan pada fasilitas perdagangan dan pengembangan kapasitas. Selang beberapa tahun, ASEAN memiliki keinginan untuk meningkatkan kerangka kerja sama *Closer Economic Partnership* (CEP) guna menciptakan hubungan ekonomi yang lebih erat dan menyeluruh dengan Australia dan Selandia Baru. Sebagai realisasi dari komitmen tersebut, pada November 2004 para pemimpin ASEAN, Australia dan Selandia Baru secara resmi memutuskan untuk memulai negosiasi pembentukan AANZFTA. Dalam forum tersebut, disepakati prinsip panduan yang mengatur ruang lingkup, meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi, serta komitmen untuk

⁴⁰ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “Background to the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA),” 2019, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/background-to-the-asean-australia-new-zealand-free-trade-area>.

⁴¹ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “The Angkor Agenda : Report of The High-Level Task Force on The AFTA-CER Free Trade Area,” 2019, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/angkor-agenda.pdf>.

melakukan penghapusan bertahap hambatan perdagangan dengan target pelaksanaan penuh dalam kurun waktu sepuluh tahun.⁴²

Perjanjian AANZFTA secara resmi ditandatangani saat melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Perjanjian ini menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru melalui komitmen bersama untuk mendorong keterbukaan perdagangan dan penguatan investasi. Perjanjian AANZFTA kemudian diajukan ke Parlemen Australia pada 16 Maret 2009, bersamaan dengan dokumen analisis kepentingan nasional dan pernyataan dampak regulasi. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 17 September 2009 parlemen Australia menyetujui undang-undang yang mengatur tarif dan aturan asal terkait perjanjian ini.⁴³

Setelah itu, perjanjian tersebut perlu mendapatkan persetujuan kerajaan untuk memberikan pengesahan secara resmi dan legislatif pada tanggal 2 Oktober 2009. Selanjutnya, Dewan Eksekutif memberikan persetujuan terhadap aturan pelaksanaan pada 8 Oktober, sehingga Pemerintah Australia dapat secara resmi mengumumkan ratifikasi perjanjian AANZFTA kepada para anggota pada 21 Oktober 2009, sebagai penanda bahwa Australia sepakat untuk melaksanakan komitmen dalam perjanjian tersebut. Perjanjian AANZFTA mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2010 bagi delapan penandatanganan, yaitu Australia, Selandia

⁴² Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “Background to the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).”

⁴³ Muhammad Fachrie, “Politik Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA),” *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 1 (2023): 13–23, <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/49/28>.

Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Sementara itu, Thailand menyusul pada 12 Maret 2010, diikuti oleh Laos pada 1 Januari 2011, Kamboja pada 4 Januari 2011, dan terakhir Indonesia pada 10 Januari 2012.⁴⁴

Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi kerja sama AANZFTA tersebut tidak lepas dari kebutuhan Indonesia untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar sejalan dengan prioritas dan kepentingan domestiknya. Sebagai negara dengan ekonomi (PDB) yang berkembang di ASEAN yang mencapai 6,23% pada tahun 2012, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perjanjian tersebut terhadap berbagai sektor strategisnya, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.⁴⁵ Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan domestik, seperti insentif untuk industri lokal dan regulasi perdagangan sudah benar-benar siap untuk mendukung implementasi perjanjian tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka AANZFTA dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2011 tentang pengesahan *Agreement Establishing The AANZFTA*.⁴⁶

⁴⁴ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “Background to the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).”

⁴⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, “Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2012 Mencapai 6,23%,” 2013, 1–9, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2013/02/05/132/pertumbuhan-produk-domestik-bruto-tahun-2012-mencapai-6-23-persen.html>.

⁴⁶ Free Trade Agreement Center, “ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA),” 2019, <https://ftacenter.codeart.id/cfind/source/files/aanzfta/document-perjanjian-aanzfta-v.1-update.pdf>.

Tabel 2. 3 Perbedaan AANZFTA dan IA-CEPA dari Berbagai Aspek

Aspek	AANZFTA	IA-CEPA
Ruang Lingkup/cakupan	AANZFTA merupakan perjanjian dagang multilateral antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dengan tujuan untuk mendorong liberalisasi aktif dan kemudahan perdagangan, jasa, dan investasi di seluruh kawasan sejak Januari 2010	IA-CEPA merupakan perjanjian bilateral yang memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih intens sebab perjanjian ini hanya berlaku di antara kedua negara. Cakupan IA-CEPA tidak hanya perdagangan barang dan jasa, namun juga membahas terkait mobilitas tenaga kerja dan dukungan teknis untuk mendorong peningkatan perdagangan
Tarif Perdagangan	Dibawah AANZFTA, menghapuskan tarif untuk 90% barang yang diperdagangkan antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.	Dalam IA-CEPA, Australia mengeliminasi 6.474 pos tarif (100% dari total pos tarif) sehingga seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%, sedangkan Indonesia mengeliminasi 10.229 pos tarif (94,5% total pos tarif)
Investasi dan Layanan	Menyediakan kerangka dasar dengan standar nasional dan MFN tanpa pembukaan kepemilikan mayoritas	Memberikan akses investasi yang lebih luas dengan skema kepemilikan asing hingga 67% di berbagai sektor
Tenaga Kerja dan Mobilitas	Menyediakan kerangka dasar (<i>Movement of Natural Persons</i>) yang mensyaratkan publikasi visa dan proses masuk sementara tanpa kuota atau program pelatihan khusus	Menyediakan paket komprehensif seperti kuota visa kerja dan liburan naik dari 1.000 menjadi 4.100 pertahun, bertambah hingga 5.000 dalam enam tahun.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Selain perbedaan yang terdapat dalam tabel di atas, menurut pernyataan dari hasil penyelarasan naskah akademik rancangan UU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia, pelaku usaha yang bergerak di industri manufaktur menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan

perjanjian AANZFTA karena terdapat sebanyak 214 pos tarif yang belum mendapatkan komitmen dari Australia. Di sisi lain, beberapa produk asal Australia masih dikenakan tarif yang tinggi saat memasuki pasar Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan keinginan untuk menginisiasi pembentukan perjanjian IA-CEPA secara bilateral agar kedua negara dapat memaksimalkan potensi perdagangan dengan menghilangkan hambatan tarif pada sejumlah produknya yang belum disepakati pada kerja sama sebelumnya, sekaligus mempercepat integrasi ekonomi yang lebih mendalam di sektor-sektor strategis lainnya.⁴⁷

2.3 Proses Perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*

Hadirnya perjanjian kerja sama internasional *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* membuka peluang bagi kedua negara dengan memberikan keuntungan berupa perluasan akses pasar untuk barang dan jasa, mempermudah arus perdagangan dan pengelolaan kepabeanan, mendukung promosi dan perlindungan investasi, *economic powerhouse*, serta menawarkan berbagai program kolaborasi ekonomi bagi Indonesia.⁴⁸ Hal tersebut telah dikaji sebelumnya dengan penyusunan studi kelayakan bersama yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa persetujuan tersebut akan dapat memberikan manfaat baik bagi kedua negara. Sehingga pada November 2010, perundingan IA-CEPA resmi diluncurkan dan berjalan sebanyak

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Indonesia Dan Australia (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).”

⁴⁸ S A Nuranisa and A K Paksi, “Peran Strategis Kerja sama IA-CEPA Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19: Bahasa Indonesia,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/47310>.

12 perundingan hingga tahun 2018 secara substansial persetujuan IA-CEPA ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Perjanjian IA-CEPA resmi ditandatangani pada 4 Maret 2019 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Simon Birmingham, serta disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di hadapan ratusan pelaku usaha, wakil pemerintah, dan undangan lainnya. Pada saat acara tersebut, kedua Menteri Perdagangan menekankan bahwa kerja sama IA-CEPA dirancang untuk memberikan manfaat bersama, tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara untuk jangka panjang. Menteri perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita, juga menyatakan bahwa produk-produk Indonesia seperti produk otomotif, kayu dan turunannya (*furniture*), tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, dan peralatan elektronik, berpotensi mengalami peningkatan ekspornya setelah perjanjian IA-CEPA resmi dilaksanakan.⁵⁰

IA-CEPA memberikan kerangka kerja yang memungkinkan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia baik di pasar Australia maupun sebaliknya. Menurut hasil studi kelayakan bersama yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2008, kemitraan IA-CEPA akan dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,23%

⁴⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Indonesia Dan Australia (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)."

⁵⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Siaran Pers : Indonesia-Australia Masuki Babak Baru Hubungan Bilateral, Perjanjian Dagang IA-CEPA Ditandatangani," 2019, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-australia-masuki-babak-baru-hubungan-bilateral-perjanjian-dagang-ia-cepa-ditandatangani>.

pada tahun 2030 dengan indikator sebesar AUD 33,1 miliar atau AUD 1,65 miliar pertahun, melalui hasil perdagangan dan investasi dari Australia serta pengembangan kapasitas berupa transfer teknologi dan pelatihan keahlian tenaga kerja di berbagai sektor.⁵¹ Dengan adanya kerja sama IA-CEPA, produk-produk lokal Indonesia seperti minyak kelapa, rempah-rempah, barang-barang elektronik, otomotif, perabotan dan furnitur, serta produk-produk industri manufaktur lainnya memiliki peluang yang besar untuk masuk ke pasar Australia dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, produk-produk lokal dari Australia seperti, daging sapi, hewan hidup, gandum, serta batu bara akan memiliki peluang juga untuk memasuki pasar Indonesia.⁵²

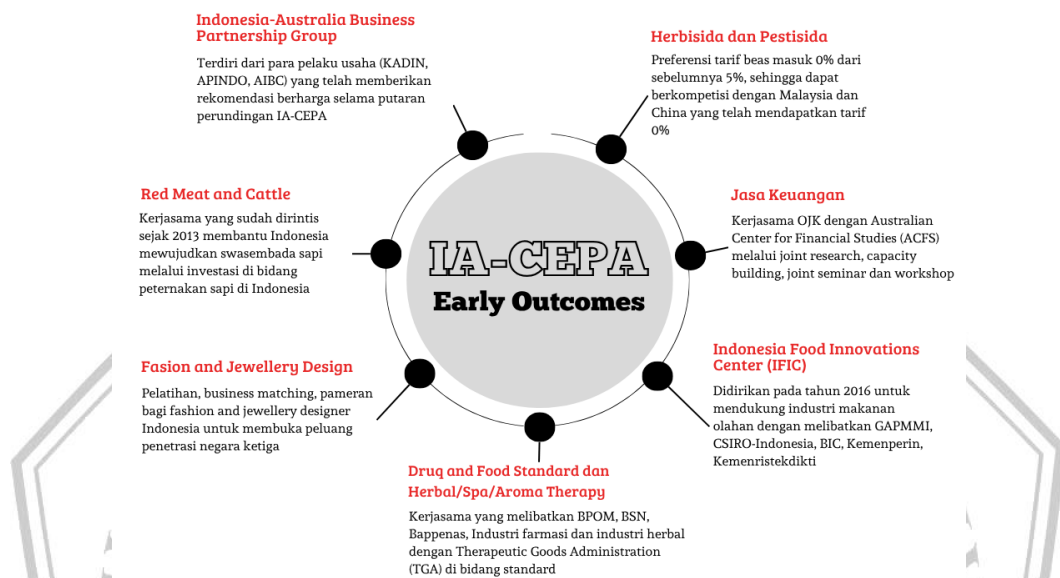
Keunggulan IA-CEPA dibandingkan dengan perjanjian perdagangan lainnya terletak pada pelaksanaan program *early outcome* yang dirancang untuk berjalan paralel dengan proses perundingan perjanjian tersebut. Menteri perdagangan menyatakan bahwa inisiatif program *early outcome* bertujuan untuk membangun kepercayaan antara Indonesia dan Australia. Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis, meliputi *Indonesia-Australia Business Partnership Agreement* (IA-BPG), *Red Meat and Cattle Partnership*, layanan keuangan, proyek pertukaran pengembangan keterampilan, pendidikan dan pelatihan vokasi, *Indonesia Food Innovation Center* (IFIC), pengembangan desain pakaian dan perhiasan, produk-

⁵¹ Free Trade Agreement Center, "IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)."

⁵² Murtasidin, "Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Dalam Kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Australia."

produk herbal dan spa, pengawasan standar obat dan makanan, dan proyek pemetaan standar.⁵³

Gambar 2. 1 IA-CEPA: Early Outcomes



Sumber: Dibuat ulang dari *Fact Sheet IA-CEPA*

Bagan tersebut menggambarkan sejumlah *early outcomes* yang telah disepakati untuk diimplementasikan oleh kedua negara untuk mendukung berjalannya perjanjian IA-CEPA secara efektif. Hasil-hasil ini merupakan bentuk konkret dari manfaat praktis yang diperoleh kedua belah pihak sebelum keseluruhan isi perjanjian diimplementasikan secara penuh. Keberadaan *early outcomes* sering kali berfungsi sebagai indikator awal keberhasilan perjanjian dan dapat memperkuat legitimasi politiknya, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam kerangka IA-CEPA, *early outcomes* memperlihatkan keseriusan kedua negara dalam mewujudkan kemitraan ekonomi yang lebih erat. Salah satu hasil penting adalah pembentukan *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG)

⁵³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Siaran Pers : Indonesia-Australia Masuki Babak Baru Hubungan Bilateral, Perjanjian Dagang IA-CEPA Ditandatangani.”

yang terdiri dari pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan *Australia Indonesia Business Council* (AIBC). Kelompok ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi selama proses perundingan IA-CEPA yang mencerminkan partisipasi aktif sektor swasta dalam diplomasi ekonomi.⁵⁴

Pada bidang pertanian, kerja sama dalam sub sektor *Red Meat and Cattle* yang dimulai sejak tahun 2013 telah mendukung Indonesia menuju swasembada daging sapi melalui investasi Australia di peternakan sapi lokal.⁵⁵ Selain itu, Indonesia memperoleh preferensi tarif bea masuk 0% untuk herbisida dan pestisida yang telah mengalami penurunan dari yang sebelumnya 5%, sehingga dapat bersaing dengan produk serupa dari Malaysia dan Tiongkok. Di sektor jasa, kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Australian Center for Financial Studies* (ACFS) diwujudkan melalui riset bersama, peningkatan kapasitas, serta seminar dan lokakarya dalam bidang jasa keuangan.

Dukungan terhadap sektor pangan dan inovasi ditunjukkan melalui pendirian *Indonesia Food Innovation Center* (IFIC) pada tahun 2016 yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Gabungan Pengurus Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) – Indonesia, dan Kementerian terkait. Kemudian di sektor industri kreatif, pelatihan, *business matching*, dan pameran dalam bidang tata busana desain

⁵⁴ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, “Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).”

⁵⁵ Sandro Gatra, “Kerja Sama Sapi, Australia Investasi Rp 556 Miliar, Indonesia Rp 1 Triliun,” Kompas.com, 2013, <https://properti.kompas.com/read/2013/07/05/1619453/Kerja.Sama.Sapi.Australia.Investasi.Rp.556.Miliar.Indonesia.Rp.1.Triliun>.

perhiasan bertujuan untuk membuka akses pasar bagi para desainer Indonesia ke negara ketiga. Lalu terakhir, kerja sama juga terjalin dalam pengelolaan standar produk makanan dan obat herbal/spa/aromaterapi, melalui kolaborasi dengan lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Otoritas Australia seperti *Therapeutic Goods Administration* (TGA) untuk mengadopsi standar internasional.⁵⁶

Selama proses perundingan *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *Indonesia–Australia Business Partnership Group* (IA-BPG) memainkan peran penting sebagai jembatan antara sektor bisnis dan pemerintah kedua negara. Melalui penyusunan *Position Paper on Considerations towards the IA-CEPA*, IA-BPG memberikan masukan strategis yang merepresentasikan kepentingan dan pandangan dunia usaha terhadap arah dan substansi perjanjian. Kelompok ini merupakan kolaborasi empat organisasi utama, KADIN Indonesia, *Australian Chamber of Commerce and Industry* (ACCI), *Indonesia Australia Business Council* (IABC), dan *Australia Indonesia Business Council* (AIBC).⁵⁷ Melalui wadah ini, IA-BPG mengumpulkan umpan balik dari pelaku usaha untuk kemudian merumuskannya menjadi rekomendasi yang dapat memperlancar negosiasi. Seperti disebutkan, “*The Chambers of Commerce and Business Councils of both countries were tasked with seeking feedback from their*

⁵⁶ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, “Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).” “Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)”

⁵⁷ Indonesia-Australia Business Council, “Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA.”

members and the wider business sector in order to inform the discussions of a joint Business Partnership Group or IA-BPG.”⁵⁸

IA-BPG juga menegaskan pentingnya konsultasi yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan agar hasil IA-CEPA benar-benar merefleksikan kebutuhan bisnis kedua negara. Hal ini tertuang dalam pernyataan, “*The organisations which formed the IA-BPG recognise and are committed to ensuring the process of ongoing consultations and continuous engagement with stakeholders, not only with business but more broadly with the media, academia, civil society and local government institutions.*”⁵⁹ Dokumen tersebut disusun tidak hanya berfungsi sebagai laporan teknis, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk memastikan IA-CEPA segera menghasilkan manfaat nyata bagi pelaku bisnis. Secara substansi, *position paper* IA-BPG menekankan bahwa IA-CEPA harus lebih luas dari sekadar *Free Trade Agreement (FTA)*, dengan menggabungkan unsur perdagangan, investasi, pembangunan kapasitas, dan ekonomi hijau. Dalam pendahuluannya, IA-BPG menyatakan bahwa “*The IA-BPG strongly supports the concept and vision of the IA-CEPA, which will underpin a new economic partnership between two nations, encompassing trade, investment, business cooperation and economic capacity building.*”⁶⁰

Dalam bagian *Deliberation on Sectors*, khususnya sektor manufaktur, IA-BPG menilai bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi lintas batas. Disebutkan bahwa “*Indonesia’s manufacturing sector has*

⁵⁸ Indonesia-Australia Business Council. Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA. 2012, Halaman 4.

⁵⁹ Indonesia-Australia Business Council. Halaman 5.

⁶⁰ Indonesia-Australia Business Council. Halaman 1.

shown recent growth following a prolonged period of stagnation due to a lack of investment. Australian manufacturing is experiencing pressures brought on by a high dollar, rising energy costs, international competition and slowing domestic demand.” Sektor manufaktur dipandang sebagai penggerak utama karena menyumbang sekitar sepertiga dari ekspor dua arah dan berpotensi menjadi pilar integrasi rantai pasok regional. Meski demikian, IA-BPG menyoroti hambatan seperti infrastruktur dan logistik di Indonesia yang masih membatasi efisiensi perdagangan. Oleh karena itu, IA-BPG merekomendasikan peningkatan investasi dua arah, pembentukan kemitraan manufaktur lintas negara, dan kerja sama teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan menggabungkan keunggulan tenaga kerja Indonesia dan teknologi Australia, IA-BPG menilai sektor manufaktur dapat menjadi motor utama pertumbuhan dalam kerangka IA-CEPA sekaligus memperkuat fondasi kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.⁶¹

Tabel 2. 4 Timeline Negosiasi Perjanjian IA-CEPA

Waktu Pelaksanaan	Putaran Negosiasi	Peristiwa	Pihak yang Terlibat	Hasil
April 2005	–	Penandatanganan <i>Joint Declaration of Comprehensive Partnership</i> oleh Presiden SBY dan PM Jhon Howard	SBY & John Howard	Kerangka kerja sama ekonomi, keamanan, dan hubungan kedua negara diinisiasi serta disepakati
2007 – 2009	–	Penyusunan studi kelayakan FTA dengan melibatkan	Tim teknis kedua negara	Rekomendasi awal untuk memulai

⁶¹ Indonesia-Australia Business Council. Halaman 10.

Waktu Pelaksanaan	Putaran Negosiasi	Peristiwa	Pihak yang Terlibat	Hasil
		pemerintah, sektor swasta dan para ahli		perundingan IA-CEPA
November 2010	Putaran 1	Negosiasi resmi IA-CEPA dimulai	SBY & Julia Gillard	Penetapan prinsip, tujuan dan struktur negosiasi sebagai pedoman putaran selanjutnya
September 2012 – Juli 2013	Putaran 1 – 2	Putaran 1–2 negosiasi berlangsung	Tim perundingan kedua negara dan IA-BPG	Pembahasan akses pasar awal dan rekomendasi <i>position paper</i> dari IA-BPG
November 2013 – Februari 2016	–	Negosiasi tertunda akibat skandal penyadapan Presiden SBY dan pejabat Indonesia oleh pihak Australia	–	Proses perundingan dibekukan sementara karena ketegangan politik
Maret 2016	Putaran 3	Negosiasi IA-CEPA diaktifkan kembali	Thomas Lembong & Steven Ciobo	Komitmen kedua pihak untuk melanjutkan pembahasan perjanjian IA-CEPA secara substansi
Mei 2016 – Desember 2017	Putaran 3 – 11	Putaran ke-3 sampai ke-11 negosiasi IA-CEPA berlangsung	Tim perundingan kedua negara	Penyelesaian isu utama termasuk akses pasar, aturan asal barang, sektor jasa, dan kerangka kerja ekonomi
Januari – Mei 2018	–	Ketua tim perundingan mempercepat proses negosiasi	Ketua tim perundingan kedua negara	Penyempurnaan draft teks perjanjian IA-

Waktu Pelaksanaan	Putaran Negosiasi	Peristiwa	Pihak yang Terlibat	Hasil
				CEPA untuk finalisasi
Juli 2018	Putaran 12	Putaran ke-12 negosiasi IA-CEPA berlangsung	Tim perundingan kedua negara	Penyelesaian semua isu teknis dan persetujuan terhadap teks akhir IA-CEPA
Agustus 2018	–	Pembahasan akhir selesai dan kesepakatan dicapai	Menteri Perdagangan & Pemimpin kedua negara	Siap untuk deklarasi penutupan negosiasi
31 Agustus 2018	–	Penandatanganan Declaration of Conclusion IA-CEPA oleh kedua Menteri Perdagangan disaksikan oleh Presiden	Enggartiasto Lukita & Simon Birmingham	Negosiasi IA-CEPA resmi dinyatakan selesai
4 Maret 2019	–	Penandatanganan perjanjian IA-CEPA oleh Menteri Perdagangan kedua negara	Enggartiasto Lukita & Simon Birmingham	Kesepakatan Final mencakup penghapusan tarif, kuota impor, dan kerangka kerja kerja sama ekonomi
Desember 2019	–	Parlemen Australia meratifikasi IA-CEPA	Parlemen Australia	Perjanjian IA-CEPA disahkan di Australia
6 Februari 2020	–	DPR RI meratifikasi IA-CEPA dengan dukungan mayoritas anggota dewan	DPR RI	Perjanjian IA-CEPA resmi disahkan di Indonesia
5 Juli 2020	–	Perjanjian IA-CEPA resmi berlaku	Pemerintah Indonesia & Australia	IA-CEPA resmi berlaku

Sumber: Data diolah penulis

Tahap pertama dimulai pada April 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri John Howard menandatangani *Joint Declaration of Comprehensive Partnership* di Jakarta. Dokumen ini menjadi dasar pembentukan kerangka kerja sama ekonomi yang lebih luas di luar perdagangan barang, mencakup investasi, jasa, pendidikan, dan kapasitas sumber daya manusia. Pada tahap ini, kedua negara berkomitmen memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang sebelumnya hanya berfokus pada perdagangan komoditas tradisional, dengan visi membangun kemitraan ekonomi yang saling melengkapi.⁶² Setelah itu, kedua negara kemudian sepakat untuk memulai perundingan pertama pada tahun 2012. Putaran pertama perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* berlangsung dalam dua tahap, dimulai pada 26-27 September 2012 dan berlanjut pada 26-27 Maret 2013 di Jakarta.⁶³

Delegasi Australia dipimpin oleh Michael Mugliston, *Special Negotiator* dari *Free Trade Agreement Division*, didukung oleh perwakilan dari tujuh lembaga pemerintah. Sementara itu, delegasi Indonesia dikepalai oleh Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional, bersama 13 lembaga terkait. Perundingan ini menegaskan kembali kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan menghasilkan manfaat nyata dalam perdagangan serta investasi. Meskipun demikian, kedua pihak juga mengakui

⁶² Fika Aulia Anfasa, "Resiprositas Indonesia Dan Australia Dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021," *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 1-7, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.622>.

⁶³ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "First Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Negotiations," 2013, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/first-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-negotiations>.

adanya tantangan dalam hubungan bilateral yang perlu diatasi, seperti perbedaan standar regulasi perdagangan, hambatan tarif dan non-tarif, serta kebutuhan harmonisasi kebijakan investasi untuk sektor prioritas.⁶⁴

Tahap kedua perundingan putaran pertama IA-CEPA memberikan perhatian khusus pada dokumen *Position Paper* yang diajukan oleh *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG). Dokumen tersebut mengusulkan dua proyek percontohan di sektor keterampilan dan pertanian yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas Indonesia. Pertama, proyek *A Healthy Diet* yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi daging merah di Indonesia dan buah tropis asal Indonesia di Australia dengan memperkuat rantai pasok dan mendukung *Masterplan for The Acceleration and Expansion of The Indonesia Economy* (MP3EI). Proyek kedua yakni *A Skilled Workforce* yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan tenaga kerja di kedua negara melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan peningkatan mobilitas tenaga kerja terampil lintas negara.⁶⁵

Putaran kedua perundingan perjanjian IA-CEPA dilaksanakan pada 29-31 Juli 2013 di Canberra, Australia. Pertemuan ini berlangsung dengan dukungan penuh dari para pemimpin kedua negara pada *Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting* dibulan Juli 2013, menegaskan pentingnya mempercepat negosiasi untuk memperkuat perdagangan dan investasi bilateral. Delegasi Australia dipimpin oleh Mr. Michael Mugliston yang menjabat sebagai *Special Negotiator* di *Free Trade*

⁶⁴ Susanto, "Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia Dalam Kerja Sama IA-CEPA: Problems of Standardization on the Indonesian-Australian Trade in IACEPA."

⁶⁵ Indonesia-Australia Business Council, "Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) - Position Paper on Considerations Toward the IA-CEPA."

Agreement Division, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan perwakilan dari setiap lembaga pemerintah. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Iman Pambagyo, selaku Direktur Jenderal kerja sama perdagangan internasional di Kementerian Perdagangan dan diikuti oleh sepuluh lembaga terkait lainnya.⁶⁶

Dalam putaran ini, pembahasan utama mencakup usulan dari *position paper* yang disampaikan oleh IA-BPG pada putaran perundingan sebelumnya. Beberapa poin penting yang dibahas dalam dokumen tersebut, seperti proyek percontohan pertukaran keterampilan dan kerja sama di sektor pertanian. Kedua negosiator juga sepakat untuk memperkuat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perundingan. Selain itu, kedua negara menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dengan merilis secara publik dokumen panduan *Guiding Principles, Objectives, and Organisation of Negotiations* yang akan menjadi acuan sepanjang proses perundingan IA-CEPA.⁶⁷

Dokumen tersebut menetapkan panduan resmi untuk negosiasi IA-CEPA yang mencakup prinsip-prinsip utama, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi hambatan perdagangan serta investasi. Cakupan negosiasi meliputi sektor strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, tenaga kerja dan isu-isu baru seperti *e-commerce*, perdagangan elektronik, lingkungan hidup, kebijakan persaingan,

⁶⁶ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Second Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Negotiations," 2013, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/second-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-negotiations#:~:text=The second round of IA,included representatives from nine agencies.>

⁶⁷ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

pengadaan pemerintah serta hak kekayaan intelektual. Isi dokumen ini juga membahas mengenai proses perundingan yang akan dilakukan secara bergantian di Indonesia dan Australia dengan melibatkan konsultasi domestik serta dialog aktif dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. selain itu, fasilitas pra-perjanjian (*Pre-Agreement Facility*) juga didirikan untuk mendanai kerja sama ekonomi yang disepakati selama negosiasi.⁶⁸

**Gambar 2. 2 Pertemuan Presiden RI dan PM Australia di Gedung
*Parliament Northern Territory di Darwin***



Sumber: Tempo.co (2012)⁶⁹

Perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) diumumkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard pada November 2010 dan dipertegas kembali melalui *Joint Communique* dalam Pertemuan Tahunan Pemimpin di Darwin pada 3 Juli 2012 yang menegaskan bahwa putaran pertama

⁶⁸ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA - CEPA): Guiding Principles, Objectives and Organisation of Negotiations,” *DFAT* (Jakarta, 2013), <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa-guiding-principles-objectives-and-organisation-of->

⁶⁹ Tempo.co, “SBY: Australia Hormati Papua Bagian Dari Indonesia & nbsp;,” Tempo.co, 2012, <https://www.tempo.co/politik/sby-australia-hormati-papua-bagian-dari-indonesia-nbsp--1672023>.

negosiasi akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 2012.⁷⁰ Usai melakukan beberapa putaran negosiasi, hubungan kedua negara mengalami ketegangan yang menyebabkan proses perundingan terhenti selama tiga tahun dari tahun 2013-2016. Ketegangan ini dipicu oleh terungkapnya penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia (*Defence Signals Directorate/DSD*) terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia pada November 2013. Berdasarkan laporan dari media *The Guardian* terungkap bahwa badan intelijen Australia (DSD/ASD) telah mencoba menyadap telepon seluler Presiden SBY sejak tahun 2009, lalu membagikan informasi yang didapatkan kepada *National Security Agency (NSA) AS*.⁷¹

Akibat insiden tersebut Indonesia menarik duta besarnya dari Canberra dan menanggukkan sejumlah kerja sama bilateral di bidang militer, keamanan, dan patroli militer. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan tidak pantas antara mitra strategis. Di sisi lain, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menolak menyampaikan komentar dan permintaan maaf atas tindakan penyadapan yang dilakukan. Lebih lanjut, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan bahwa semua pemerintah mengumpulkan informasi dan semua pemerintah tahu bahwa setiap pemerintah lainnya juga mengumpulkan informasi. Pengungkapan tersebut makin memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya telah tegang akibat

⁷⁰ Julia Gillard, "Joint Communiqué: Australia-Indonesia Annual Leaders' Meeting," DFAT, 2012, <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-18677>.

⁷¹ Bridie Jabour and Martin Pengelly, "Australia Spied on Indonesia Talks with US Law Firm in 2013," *The Guardian*, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/16/australia-spied-indonesia-talks-us-firm>.

kebijakan Australia soal pencari suaka dan dugaan spionase melalui kedutaannya di Indonesia.⁷²

Melalui pernyataan di Istana Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penyadapan telepon tersebut merupakan melanggar hukum internasional dan menantikan pernyataan serta sikap resmi dari pemerintah Australia. Menindaklanjuti perkara tersebut, pada 20 November 2013 Presiden Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Tony Abbott untuk meminta klarifikasi dan pernyataan resmi atas kasus penyadapan yang dilakukan. Perdana Menteri Tony Abbott membalas lewat surat pada 23 November 2013, yang berisi janji bahwa Australia tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Indonesia di masa depan dan menyetujui pembuatan protokol atau aturan perilaku (*code of conduct*) untuk mencegah insiden serupa.⁷³

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sepakat melakukan dialog dan berkerja sama melalui rencana enam langkah yang diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulihkan kerja sama penuh antara kedua negara.⁷⁴ Sebagai langkah pertama, pertemuan kedua Menteri Luar Negeri tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu sensitif yang dapat memicu ketegangan di antara kedua negara. Kedua, menyusun protokol dan kode etik kerja sama intelijen yang mengikat agar

⁷² Oliver Laughland, "Indonesia Recalls Canberra Ambassador as Phone-Tapping Diplomatic Row Grows," *The Guardian*, 2018, <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/indonesia-recalls-canberra-ambassador-phone-australia>.

⁷³ Oliver Laughland and Lenore Taylor, "Indonesia Halts Co-Operation on People Smuggling in Phone Tapping Row," *The Guardian*, 2013, <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/20/indonesia-halts-co-operation-people-smuggling>.

⁷⁴ Lenore Taylor, "No Agreement with Indonesia to Stop Spying, Says Tony Abbott," *The Guardian*, 2013, <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/no-agreement-with-indonesia-to-stop-spying-says-tony-abbott>.

insiden serupa tidak terulang kembali. Ketiga, Presiden SBY meninjau langsung protokol tersebut untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terakomodasi. Keempat, protokol dan kode etik yang telah disepakati akan disahkan secara formal oleh pemimpin kedua negara. Langkah kelima mencakup implementasi dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati. Langkah terakhir, kerja sama bilateral di bidang militer, keamanan, dan ekonomi dipulihkan kembali sepenuhnya setelah kepercayaan kedua negara kembali terbangun.⁷⁵

Sebagai tindak lanjut dari dialog yang telah dilakukan, Indonesia dan Australia kemudian mencapai kesepakatan penting dengan menandatangani *Code of Conduct on Intelligence Cooperation* pada 28 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali.⁷⁶ Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan bilateral yang sempat renggang akibat kasus penyadapan. Kesepakatan tersebut memuat dua poin utama, pertama, pihak yang bersangkutan sepakat untuk tidak menggunakan kemampuan intelijennya, termasuk aktivitas penyadapan dan sumber daya lainnya dengan cara yang dapat merugikan kepentingan para pihak. Kedua, pihak yang terkait akan meningkatkan

⁷⁵ Ahmad Mafud Shaffan, "Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia," *Journal of Internasional Relations* 4, no. 2 (2018): 285–94, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/20350/19186>.

⁷⁶ Daniel Hurst, "Australia and Indonesia Sign Spying Code of Conduct," *The Guardian*, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/28/australia-and-indonesia-sign-spying-code-of-conduct>.

kerja sama intelijen antara lembaga dan instansi terkait sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.⁷⁷

Situasi semakin memburuk pada tahun 2014 ketika Australia menerapkan kebijakan kontroversial *Operation Sovereign Borders*, yakni pengembalian paksa kapal pencari suaka ke perairan Indonesia yang dinilai melanggar kedaulatan dan memicu protes keras dari pihak Indonesia. Ketegangan meningkat saat analisis dari *Griffith Asia Institute* mengingatkan Australia bahwa kebijakan pemulangan kapan ini berpotensi memperburuk hubungan diplomatik dan menimbulkan risiko hukum sehubungan dengan kewajiban internasional terhadap pencari suaka.⁷⁸ Tekanan tambah muncul setelah kapal-kapal Angkatan laut Australia dilaporkan memutarbalikkan satu atau lebih kapal-kapal yang sebagian besar berisi pencari suaka dari Timur Tengah dan bahkan tidak sengaja melintasi perairan Indonesia sehingga menambah tekanan pada hubungan kedua negara. Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada Australia agar tidak menguji kedaulatan wilayah Indonesia, sambil menegaskan bahwa pelanggaran perairan oleh kapal-kapal Angkatan laut Australia yang memulangkan pencari suaka tidak dapat diterima dan bahwa setiap negara harus menghormati hukum internasional.⁷⁹

⁷⁷ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ('The Lombok Treaty')," DFAT, 2014, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation>.

⁷⁸ Daniel Hurst, Lenore Taylor, and Helen Davidson, "Supplying Lifeboats to Asylum Seekers May Rile Indonesia, Australia Warned," *The Guardian*, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/jan/08/turning-back-boats-could-antagonise-indonesia>.

⁷⁹ Ian Lloyd Neubauer, "New Indonesian President Jokowi Talks Tough With Fading Power Australia," *Time Magazine*, 2014, <https://time.com/3550447/jokowi-australia-indonesia-china-relations-asylum-seekers/>.

Sebagai tanggapannya, Pemerintah Australia melalui Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Scott Morrison, menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan menyatakan bahwa insiden itu adalah murni kesalahan navigasi. Australia berjanji untuk meninjau ulang prosedur operasi dan akan melakukan upaya untuk memastikan tidak terjadi lagi.⁸⁰ Australia juga menyampaikan komitmennya untuk menghormati perbatasan maritim Indonesia dan menunda atau menyesuaikan operasi *Sovereign Borders* yang menerapkan kebijakan *turn back the boats* sampai ada kepastian bahwa insiden serupa tidak terulang, sehingga ketegangan tersebut mereda dan hubungan bilateral sempat membaik meski diskusi strategis dan ekonomi tetap berhenti sementara.⁸¹

Ketegangan memuncak pada tahun 2015 ketika Indonesia mengeksekusi dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dalam kasus narkoba *Bali Nine*, sehingga pemerintah Australia menarik juga menarik duta besarnya sebagai bentuk protes. rangkaian peristiwa tersebut semakin memperkeruh krisis kepercayaan bilateral dan membuat kedua negara sulit melanjutkan dialog perundingan IA-CEPA.⁸² Pada Februari 2006, keduanya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Denpasar sebagai “*mastermind*” atau otak penyeludupan. Sejak tahun 2010 sampai 2014, pihak keluarga maupun pemerintah

⁸⁰ Rod McGuirk, “Australia Apologizes for Boats Entering Indonesia,” The Jakarta Post, 2014, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/01/17/australia-apologizes-boats-entering-indonesia.html>.

⁸¹ Lenore Taylor and Agency, “Indonesia Demands Suspension of Australia’s Asylum Operations,” The Guardian, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/jan/17/australia-apologises-patrol-boats-indonesian-waters>.

⁸² Ariani DA and Elistania, “Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Di Tengah Dinamika Kedua Negara: Upaya Penguatan Melalui Sektor Keamanan,” *BALCONY: BUDI Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 3, no. 1 (2019): 1–15, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/50>.

Australia mengajukan berbagai upaya hukum, termasuk banding dan grasi. Namun, semua upaya tersebut ditolak oleh Presiden Joko Widodo sambil menegaskan bahwa grasi tidak diberikan untuk kejahatan narkoba.⁸³

Menjelang eksekusi pada awal 2015, Pemerintah Australia melancarkan upaya diplomatik termasuk lebih dari 55 permohonan resmi di tingkat Menteri dan Perdana Menteri untuk meyakinkan Indonesia membatalkan hukuman mati terhadap dua warganya. PM Tony Abbott juga secara langsung menghubungi Presiden Joko Widodo, bahkan menawarkan opsi pertukaran tahanan sebagai solusi alternatif.⁸⁴ Namun, Presiden Jokowi tetap menegaskan bahwa pemberantasan narkoba adalah prioritas nasional dan grasi tidak akan diberikan bagi pelaku kejahatan narkoba. Namun pada akhirnya eksekusi tersebut tidak dapat dihindari, eksekusi tersebut dilaksanakan pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan. Kedua warga Australia tersebut ditembak mati oleh regu tembak bersama enam terpidana lainnya.⁸⁵

Keputusan tersebut berujung dengan penarikan Duta Besar Australia, Paul Grigson dari Jakarta dan menghentikan semua kontak antar menteri selama lebih dari sebulan. PM Tony Abbott menyebut eksekusi itu sebagai tindakan yang kejam dan tidak perlu serta memperingatkan potensi dampak buruk terhadap hubungan

⁸³ Kate Lamb and Agency, "Bali Nine: Indonesian Court Rejects Attempt to Have Death Sentences Reconsidered," *The Guardian*, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/24/indonesian-court-rejects-attempt-to-have-drug-traffickers-death-sentences-reconsidered>.

⁸⁴ George Roberts, "Bali Nine: Indonesia Gives Approval for Andrew Chan and Myuran Sukumaran's Transfer from Prison to Be Executed," *abc.net*, 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-02-12/bali-nine-chan-sukumaran-transfer-approved-ahead-of-execution/6089580>.

⁸⁵ *Abc.net*, "Bali Nine: Andrew Chan and Myuran Sukumaran Executed by Indonesian Firing Squad," *abc.net.au*, 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-04-29/andrew-chan-and-myuran-sukumaran-executed/6426654>.

bilateral. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa eksekusi tersebut merupakan bagian dari kedaulatan hukum yang tidak dapat dinegosiasikan. Ketegangan ini menyebabkan negosiasi IA-CEPA terhenti sementara untuk beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Hubungan mulai pulih setelah kunjungan PM Malcolm Turnbull ke Jakarta pada November 2015 menjadi pembuka jalan bagi lanjutan perundingan IA-CEPA pada Maret 2016.⁸⁶

Selama kunjungan Perdana Menteri Malcolm Turnbull ke Jakarta pada akhir 2015, terjadi semacam reset diplomatik yang terbukti menjadi momen penting untuk memulihkan setelah krisis akibat pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terjerat dalam kasus penyelundupan narkoba. Kunjungan PM ini membantu membuka kembali jalur dialog yang sempat membeku dan memberi ruang bagi munculnya kembali pertemuan tingkat tinggi antara kedua. Pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara tidak hanya melibatkan pemimpin negara, namun juga tercermin dalam kedekatan antara Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Mitranya dari Indonesia Retno Marsudi yang sering melakukan komunikasi melalui pesan teks untuk menjaga intensitas dialog diplomatik.⁸⁷

Kunjungan Malcolm Turnbull ke Jakarta dinilai berhasil memicu kebangkitan kembali pembicaraan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Meskipun negosiasi perjanjian ini telah dimulai beberapa tahun sebelumnya, prosesnya sempat terhambat oleh berbagai ketegangan

⁸⁶ Michael Safi et al., "Bali Nine: Australia Recalls Ambassador as World Condemns Executions," *The Guardian*, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/bali-nine-australia-recalls-ambassador-as-world-condemns-executions>.

⁸⁷ Jarrad Harvey, "Indonesia-Australia Relations: A Year After the Executions," *The Diplomat*, 2016, <https://thediplomat.com/2016/05/indonesia-australia-relations-a-year-after-the-executions/>.

diplomatic dan persoalan politik yang memperburuk hubungan kedua negara. Mantan Menteri Perdagangan Australia, Andrew Robb, juga mengakui bahwa selama ini Canberra lebih fokus perdagangan dengan Asia Timur Laut, sementara Indonesia sebagai negara tetangga dekat justru berada di urutan ke-12 dalam daftar mitra dagang Australia. Kini dengan kesadaran yang semakin kuat tentang saling melengkapi ekonomi kedua negara dan potensi Indonesia sebagai salah satu pasar ekspor utama, terutama dalam upayanya menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2030, niat politik untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas komprehensif (IA-CEPA) ini tampak semakin kuat di kedua negara.⁸⁸

Setelah hubungan kedua negara mulai membaik, Indonesia dan Australia berupaya memulihkan kepercayaan melalui dialog diplomatik dan penguatan kerja sama strategis, termasuk dalam melanjutkan negosiasi perjanjian IA-CEPA. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia tersebut sempat membekukan hubungan bilateral kedua negara, bahkan sampai menarik kedutaan besar Indonesia dari Australia.⁸⁹ Setelah Australia menandatangani perjanjian *Code of Conduct*, kedua negara merasa perlu untuk membangun kembali pondasi hubungan bilateral yang lebih kokoh berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama. Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Steven Ciobo, dan Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Lembong, sepakat untuk melanjutkan kembali negosiasi menuju perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Melalui IA-CEPA, kedua negara tidak hanya berupaya meningkatkan hubungan ekonomi,

⁸⁸ Harvey.

⁸⁹ Rusmin, Suryadi, and Abdullah, "Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018."

tetapi juga mempertegas komitmen untuk bekerja sama di sektor-sektor penting seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pengembangan industri.⁹⁰

Putaran ketiga perundingan perjanjian IA-CEPA kembali dilakukan pada 2-4 Mei 2016 yang diselenggarakan oleh pihak Indonesia di Yogyakarta. Putaran ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk mempererat hubungan kedua negara yang sempat memanas dan membangun kembali kepercayaan sambil membahas upaya memperkuat hubungan bilateral melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Deddy Saleh dan delegasi dipimpin oleh Ms. Frances Lisson. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Indonesia, Lembong, dan Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Ciobo, telah melakukan pertemuan tingkat menteri pada 16 Maret 2016, membahas dan mengumumkan mengenai komitmen bersama untuk melanjutkan pengaktifan kembali negosiasi IA-CEPA.⁹¹

Ketua negosiator dari Indonesia dan Australia menegaskan pentingnya prioritas untuk segera menyelesaikan IA-CEPA dengan ambisi yang tinggi. Komitmen ini mencerminkan keinginan kuat kedua negara untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi bilateral. Negosiasi mencakup diskusi mendalam terkait pendekatan untuk barang, jasa, dan investasi, serta isu lintas sektoral seperti e-

⁹⁰ Gladys Ariella Kristanto, "Analisis Kepatuhan Australia Dan Indonesia Terhadap Code of Conduct Dalam Hubungan Indonesia – Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penjadwalan Tahun 2014-2019," *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 510–516, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28498>.

⁹¹ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Third Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Negotiations," 2016, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/third-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-negotiations#:~:text=Partnership Agreement negotiations-,Third round of Indonesia-Australia Comprehensive>.

commerce dan kebijakan persaingan.⁹² Kedua negara sepakat bahwa IA-CEPA harus mudah digunakan dan mampu memfasilitasi perdagangan secara efektif. Tujuannya adalah menjadikan IA-CEPA sebagai instrumen yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga berfungsi optimal untuk memperluas peluang di sektor-sektor strategis. Kesepakatan pada program kerja ke depan mencerminkan kolaborasi erat untuk memastikan pembahasan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak.⁹³

Sebagai bagian dari upaya menyusun IA-CEPA yang inklusif dan relevan, *The Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG) diaktifkan untuk dapat berkonsultasi dengan berbagai sektor industri di kedua negara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang strategis dalam kerangka IA-CEPA. Hasil dari konsultasi tersebut akan disusun dalam laporan yang komprehensif dan disampaikan kepada para negosiator pada perundingan selanjutnya. Karena pertimbangan yang dinegosiasikan akan menjadi landasan bagi pembentukan aturan yang mengikat kedua negara dalam kerja sama, maka kesempatan bagi individu maupun pelaku bisnis untuk memberikan masukan yang dapat membantu menyempurnakan hasil negosiasi IA-CEPA.⁹⁴

Putaran keempat perundingan IA-CEPA berlangsung di Sydney, Australia, pada 23-26 Agustus 2016. Hal ini menjadi momen penting dalam melanjutkan proses

⁹² Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

⁹³ Siti Khairunnissa, "Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia," *Law, Development & Justice Review* 7, no. 3 (2024): 213–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/25416/11914>.

⁹⁴ Kedutaan Besar Australia Indonesia, "Indonesia-Australia Business Partnership Group Menyampaikan Laporan Kedua," 2016, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_038.html.

negosiasi setelah perjanjian ini diaktifkan kembali oleh para Menteri pada Maret 2016. Lebih dari 100 delegasi hadir menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk mempercepat pencapaian tersebut. Delegasi Australia dipimpin oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dan mencakup sejumlah departemen terkait, seperti industri, inovasi dan sains, pertanian dan sumber daya air, serta Kesehatan, komunikasi dan seni. Sementara itu, Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan dan terdiri atas perwakilan dari Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Keuangan dan Pariwisata, serta Lembaga seperti OJK, KPPU, dan BPOM. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan luasnya cakupan perundingan yang meliputi sektor-sektor strategis bagi kedua negara.⁹⁵

Dalam perundingan ini, kepala negosiator dari Australia dan Indonesia menegaskan kembali prioritas para Menteri untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu 12 hingga 18 bulan. Komitmen ini mencerminkan urgensi bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Salah satu elemen penting dari perundingan ini adalah pembahasan laporan tahap 2 dari *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG) yang memberikan berbagai rekomendasi strategis. Kedua pihak sepakat untuk mempertimbangkan berbagai rekomendasi tersebut dapat diterapkan guna mempercepat kemajuan negosiasi.⁹⁶

⁹⁵ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Fourth Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Negotiations," 2016, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/fourth-round-of-ia-cepa-negotiations>.

⁹⁶ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Setelah itu, diskusi selama perundingan mencakup isu-isu utama yang relevan dengan kebutuhan domestik dan prioritas ekonomi internasional masing-masing negara. Dengan cakupan dan topik yang luas, putaran ini tidak hanya menegaskan komitmen untuk menyelaraskan kepentingan kedua negara, tetapi juga membuka jalan untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi dan inovasi. Hasil dari perundingan keempat IA-CEPA adalah kedua negara sepakat untuk segera mengimplementasikan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Skill Exchange Development Pilot Project* atau proyek percobaan pengembangan pertukaran keterampilan. Pada perundingan keempat juga telah dibahas mengenai adanya agenda pembahasan kesepakatan awal IA-CEPA yaitu *IA-BPG report*, *Red Meat and Cattle* dan *Financial Service* (MoU antara Otoritas Jasa Keuangan dan *Australian Centre for Financial Studies Monash University*).⁹⁷

Putaran kelima perundingan IA-CEPA diselenggarakan oleh pihak Indonesia di Bandung pada 31 Oktober hingga 4 November 2016. Putaran ini menjadi perundingan ketiga negosiasi yang dilaksanakan sejak perjanjian IA-CEPA diaktifkan kembali oleh para Menteri pada Maret 2016. Dalam putaran kelima negosiasi IA-CEPA, baik Australia maupun Indonesia melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga strategis yang mencakup berbagai sektor penting di masing-masing negara. Delegasi Australia dipimpin oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dan mencakup perwakilan dari Departemen Pertanian

⁹⁷ Adhitya Himawan, "Indonesia-CEPA Segera Teken Kerja Sama Tenaga Kerja," *Suara.com*, 2016, <https://www.suara.com/bisnis/2016/08/28/193848/indonesia-cepa-segera-teken-kerja-sama-tenaga-kerja>.

dan Sumber Daya Air, Pendidikan dan Pelatihan, Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, serta Industri. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian Perdagangan dengan partisipasi aktif dan sejumlah kementerian dan lembaga strategis. Perwakilan Indonesia mencakup bidang pertanian, komunikasi dan informatika, ekonomi, energi, lingkungan, keuangan, luar negeri, kesehatan, perindustrian, dan perencanaan pembangunan, serta standardisasi nasional. Kehadiran Lembaga-lembaga seperti BAPPENAS, Kementerian Pariwisata, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).⁹⁸

Perundingan pada tahap ini menunjukkan keseriusan dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi strategis antara kedua negara. Para kepala negosiator menegaskan optimisme mereka bahwa proses ini dapat diselesaikan sebelum akhir 2017. Kedua negara saling bertukar penawaran awal terkait akses pasar dan mendiskusikan draf teks untuk seluruh bab yang direncanakan, menunjukkan kemajuan nyata dalam proses negosiasi. Berbagai kelompok negosiasi dan teknis turut bekerja sama dalam membahas isu-isu penting seperti perdagangan barang, hambatan teknis, prosedur kepabeanan, hingga layanan telekomunikasi dan keuangan. Topik lain yang menjadi sorotan meliputi aturan asal barang, kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan elektronik, *E-commerce*, kebijakan persaingan, serta kerangka kelembagaan.⁹⁹

⁹⁸ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Fifth Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Negotiations," 2016, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/fifth-round-of-ia-cepa-negotiations>.

⁹⁹ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Putaran keenam perundingan IA-CEPA diselenggarakan oleh pihak Australia di Canberra dari tanggal 20 hingga 25 Februari 2017. Pertemuan kali ini merupakan putaran keempat negosiasi yang diadakan sejak IA-CEPA diaktifkan kembali oleh para menteri sejak Maret 2016. Delegasi Australia dalam putaran keenam perundingan IA-CEPA dipimpin oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dengan keikutsertaan sejumlah perwakilan dari berbagai departemen pemerintah. Di antara departemen yang terlibat adalah Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, Jaksa Agung, *The Australian Trade and Investment Commission* (Austrade), serta Komunikasi dan Seni yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan perjanjian dengan prioritas domestik Australia. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Australia berupaya untuk merancang kerangka perjanjian yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan hubungan bilateral dengan Indonesia.¹⁰⁰

Delegasi Indonesia dalam putaran keenam perundingan IA-CEPA dipimpin oleh Kementerian Perdagangan Enggartiasto Lukita, dengan dukungan luas dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Partisipasi instansi seperti Kementerian Pertanian, Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu, kehadiran Lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Standardisasi

¹⁰⁰ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Sixth Round of IA-CEPA Negotiations," 2017, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/sixth-round-of-ia-cepa-negotiations#:~:text=The sixth round of IA,by Ministers in March 2016.>

Nasional (BSN). Dalam pertemuan ini terdapat dua agenda penting yang dibahas oleh kedua negara, yaitu membahas *pending matter* yang belum disepakati pada putaran sebelumnya dan membahas salah satu *early outcome* dari kerja sama IA-CEPA yaitu *Standard Mapping Project*. Proyek tersebut bertujuan mengidentifikasi kesenjangan standar antara Indonesia dan Australia melalui pemetaan standar wajib, pertukaran informasi terkait preferensi standar dalam regulasi, dan analisis data perdagangan kedua negara. Hasil kunjungan dari delegasi lembaga Badan Standardisasi Nasional (BSN) ke kantor standards Australia menyepakati pelaksanaan kegiatan ini selama enam bulan, dimulai dengan pembentukan *steering committee* sebagai langkah awal.¹⁰¹

Selain itu, hasil dari proses perundingan keenam IA-CEPA mencakup pertukaran revisi tawaran akses pasar barang antara kedua negara dan pembahasan mengenai isu strategis seperti *Vocations and Education Training* (VET). Indonesia mengusulkan kerja sama VET di beberapa sektor, yaitu pendidikan, pertanian, industri, kesehatan, pariwisata, dan *hospitality*, dengan jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) dan diploma. Program ini difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis dan profesional sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Indonesia menekankan pentingnya pelatihan berbasis standar tinggi untuk menciptakan SDM yang kompetitif secara global, sehingga mampu memberikan layanan terbaik.¹⁰²

¹⁰¹ Badan Standardisasi Nasional (BSN), “Standard Mapping Project Untuk Mendukung Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – CEPA),” 2017, https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8204/.

¹⁰² Kompas.com, “Putaran Ke-6 IA CEPA, Indonesia Fokus Pada Kerja Sama Vokasi,” Kompas.com, 2017, <https://money.kompas.com/read/2017/03/02/170000826/putaran.ke-6.ia.cepa.indonesia.fokus.pada.kerja.sama.vokasi>.

Putaran ketujuh perundingan IA-CEPA diselenggarakan oleh pihak Indonesia di Jakarta pada 22-26 Mei 2017. Putaran ini merupakan pertemuan kelima setelah perjanjian IA-CEPA diaktifkan kembali oleh para Menteri dari kedua negara. Melanjutkan dari putaran sebelumnya, delegasi Australia kembali dipimpin oleh DFAT dan melibatkan beberapa departemen yang mengurus sektor-sektor strategis, seperti Pertanian dan Sumber Daya Air, Jaksa Agung, Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, serta Industri, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan. Sementara itu, delegasi Indonesia masih dipimpin oleh Kementerian perdagangan dengan melibatkan beberapa partisipasi dari Kementerian dan Lembaga pemerintahan, termasuk Pertanian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di pihak Indonesia juga menjadi perhatian terhadap perencanaan jangka panjang dan penguatan regulasi.¹⁰³

Pertemuan ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yakni melanjutkan pembahasan mengenai tawaran akses pasar yang telah direvisi untuk barang dan jasa, serta menyampaikan penawaran awal untuk investasi. Diskusi mendalam dilanjutkan oleh kelompok negosiasi khusus yang membahas berbagai isu strategis, termasuk perdagangan barang (termasuk asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan), jasa, investasi, kerja sama ekonomi, perdagangan

¹⁰³ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Seventh Round of IA-CEPA Negotiations," 2017, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/seventh-round-of-ia-cepa-negotiations>.

elektronik, kebijakan persaingan, dan ketentuan institusional serta kerangka kerja perjanjian.¹⁰⁴ Menurut ketua delegasi Indonesia, Deddy Saleh, pertemuan kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang masih berfokus pada pertukaran pemikiran mengenai berbagai isu, sedangkan pada tahap ini diskusi telah lebih terarah dan berfokus pada isi naskah perjanjian serta mencakup negosiasi terkait akses pasar.¹⁰⁵

Putaran kedelapan perundingan IA-CEPA diselenggarakan oleh pihak Australia di Canberra dari tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2017. Australia mengirim delegasi yang dipimpin oleh DFAT dan melibatkan beberapa departemen, seperti Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, Jaksa Agung, Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Kesehatan, Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Departemen Industri Inovasi dan Ilmu Pengetahuan, Perbendaharaan, serta Standar Australia. Sementara itu, Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan dan melibatkan beragam Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Perencanaan

¹⁰⁴ Rizka Kasila Ariyanthi, "Kerja Sama Indonesia Australia Incar Pasar Dunia," *Wartaekonomi.co.id*, 2017, <https://wartaekonomi.co.id/read142618/kerja-sama-indonesia-australia-incar-pasar-dunia>.

¹⁰⁵ Indonesia Expat, "Indonesia Dan Australia Selesaikan Putaran Kemitraan Ekonomi Ke-7," 2017, <https://indonesiaexpat.id/news/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership/>.

Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kementerian Perhubungan.¹⁰⁶

Pada pertemuan ini, Indonesia dan Australia bertukar penawaran akses pasar terbaru untuk barang dan investasi, melanjutkan perundingan sebelumnya dengan tambahan beberapa kementerian dan lembaga yang ikut terlibat. Kemudian kelompok perundingan melanjutkan diskusi mendalam mengenai sejumlah isu, seperti tindakan non-tarif (untuk setiap produk dari kedua yang diperdagangkan), investasi, kerja sama ekonomi, perdagangan elektronik, kebijakan persaingan, serta ketentuan institusional dan kerangka kerja. Berbeda dengan putaran sebelumnya, perundingan kali ini lebih mengerucut dan fokus membahas isu-isu perdagangan yang berkaitan dengan isi perjanjian. Ketua delegasi Indonesia, Deddy Saleh, menyatakan bahwa proses perundingan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini (2017) dan diperkirakan membutuhkan dua atau tiga pertemuan lagi untuk mencapai kesepakatan final.¹⁰⁷

Putaran kesembilan perundingan IA-CEPA diselenggarakan oleh pihak Indonesia di Jakarta pada 2-6 Oktober 2017. Putaran ini dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita, membahas mengenai upaya para negosiator kedua negara untuk mencari segala cara guna membantu

¹⁰⁶ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Eighth Round of IA-CEPA Negotiations," 2017, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/eighth-round-of-ia-cepa-negotiations>.

¹⁰⁷ Wiji Nurhayat, Ela Nurlaela, and Dewi Rachmat Kusuma, "Perjanjian Perdagangan Bebas RI-Australia Rampung Tahun Ini," *KumparanNEWS*, 2017, <https://kumparan.com/kumparannews/perjanjian-perdagangan-bebas-ri-australia-rampung-tahun-ini/full>.

menyelesaikan IA-CEPA pada akhir tahun 2017.¹⁰⁸ Kepala negosiator Indonesia, Deddy Saleh, menyatakan bahwa beberapa bab dan ketentuan yang ada pada perjanjian telah selesai, namun masih terdapat ketentuan yang belum perlu diselaraskan terkait dengan barang dan jasa yang sensitif bagi kedua negara, serta akses pasar untuk beberapa barang dan tenaga kerja. Indonesia meminta akses pasar yang lebih baik untuk produk tekstil, alas kaki, dan otomotifnya dengan tarif yang lebih rendah, sementara Australia menuntut tarif lebih rendah untuk produk baja, susu, daging, serta kepemilikan mayoritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di Indonesia.¹⁰⁹

Kedua negara sedang melakukan negosiasi terkait tarif impor 0% untuk tiga produk dari masing-masing negara. Pihak Australia meminta ke Indonesia untuk menerima penghapusan tarif impor untuk produk susu skim dan susu skim bubuk, *copper cathode and hot rolled coil (HRC)*, dan *cold rolled coil (CRC) steel*. Sementara Indonesia meminta Australia untuk mencabut tarif impor untuk produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki dari Indonesia. Direktur Jenderal Ketahanan Industri dan Akses Internasional, Kementerian Perindustrian, Harjanto, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara komprehensif dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, menanggapi hal tersebut Indonesia juga akan meminta Australia untuk berinvestasi di Indonesia dengan imbalan skema bebas bea khusus pengguna/*The user specific*

¹⁰⁸ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), "Ninth Round of IA-CEPA Negotiations," 2017, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/ninth-round-of-ia-cepa-negotiations>.

¹⁰⁹ Stefani Ribka, "RI, Oz Aim to Settle Crucial Points in CEPA 9th Round," The Jakarta Post, 2017, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/10/03/ri-oz-aim-to-settle-crucial-points-in-cepa-9th-round.html>.

dutty free schema (USDFS) atau tarif 0% dari Indonesia untuk produk-produknya selain penghapusan tarif impor untuk tiga produk Indonesia (tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki).¹¹⁰

Putaran kesepuluh perundingan IA-CEPA diselenggarakan pada 13-17 November 2017 di Jakarta. Perundingan ini menjadi pertemuan penting bagi kedua negara untuk memaksimalkan finalisasi teks perjanjian yang mencakup isu-isu utama seperti aturan asal barang (RoO), akses pasar, kerja sama pendidikan vokasi (VET), serta investasi bilateral. Namun beberapa isu teknis masih belum selesai sepenuhnya, sehingga kedua pihak menyepakati pertemuan tambahan pada awal Desember 2017 untuk menyempurnakan kesepakatan. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil akhir yang sama-sama dapat diterima dan memuaskan bagi kedua pihak yang terlibat.¹¹¹ Menteri perdagangan, Enggartiasto Lukita, menghadiri secara langsung perundingan untuk memberikan dukungan kepada tim negosiator Indonesia, sekaligus menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar perjanjian IA-CEPA dapat diselesaikan secepat mungkin.¹¹²

Pada putaran ini kedua negara berhasil menyepakati pengembangan kemitraan strategis di sektor pendidikan vokasi. Menurut data dari dokumen *National Interest Analysis* (DFAT), perjanjian IA-CEPA memungkinkan penyedia Australia *Vocational Education and Training* (VET) mendirikan usaha bersama di Indonesia

¹¹⁰ Stefani Ribka, "RI, OZ Negotiate Exchange of Zero Tariffs for Three Products," The Jakarta Post, 2017, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/10/13/ri-oz-negotiate-exchange-of-zero-tariffs-for-three-products.html>.

¹¹¹ Monitor.co.id, "Putaran Ke-10, Kemitraan Strategis Indonesia-Australia Semakin Dekat," 2017, <https://monitor.co.id/2017/11/18/putaran-ke-10-kemitraan-strategis-indonesia-australia-semakin-dekat/>.

¹¹² Heru Purwanto, "Indonesia-Australia CEPA Negotiations Enter Final Phase," Antaranews.com, 2018, <https://en.antaranews.com/news/113472/indonesia-australia-cepa-negotiations-enter-final-phase>.

dengan kepemilikan hingga 67%, serta melemahkan pembatasan perizinan dan persyaratan yang berat.¹¹³ Selain itu, melalui program “*Skills Exchange*”, kedua negara dapat sepakat memfasilitasi pelatihan bersama, pertukaran keahlian seperti perawatan dan chef, serta pelatihan tenaga kesehatan oleh Australia di Indonesia. Upaya ini mendukung pembangunan modal manusia Indonesia dan meningkatkan daya saing SDM dalam rangka visi ekonomi 2030.¹¹⁴

Putaran kesebelas perundingan IA-CEPA berlangsung di Jakarta pada 4-8 Desember 2017. Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Deddy Saleh bersama direktur perundingan bilateral Ni Made Ayu Marthini melanjutkan pembahasan sejumlah isu penting yang belum rampung pada putaran sebelumnya. Fokus utama mencakup akses pasar untuk barang, jasa, dan investasi serta penyempurnaan teks kerja sama ekonomi. Namun, proses negosiasi saat itu telah mencapai batas kewenangan teknis yang dimiliki oleh para negosiator, sehingga kelanjutan penyelesaian membutuhkan keputusan di tingkat pimpinan, yakni para Menteri dan Wakil Presiden.¹¹⁵

Setelah melewati sebelas putaran perundingan sejak Maret 2016, pemerintah Indonesia menargetkan finalisasi IA-CEPA dapat diselesaikan pada tahun yang sama. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sebagian

¹¹³ Simon Birmingham and Enggartiaso Lukita, “National Interest Analysis with Attachments Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of Australia and the Government of Indonesia and Associated Side Letters,” 2019, 1–93, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/iacepa-1a-national-interest-analysis-including-attachments.pdf>?

¹¹⁴ Australia Indonesia Business Council (AIBC), “Shaping The IA-CEPA : Realising Stakeholder Aspirations Prepared by the Australia Indonesia Business Council for The Indonesia Australia Bussiness Partnership Group.”

¹¹⁵ Rusmin, Suryadi, and Abdullah, “Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018.”

besar isu strategis di sektor industri telah mencapai kesepakatan dengan pihak Australia. Dalam pernyataan usai pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan AO, Airlangga mengungkapkan bahwa Australia telah menyetujui permintaan Indonesia untuk menerapkan skema *Tariff Rate Quota* (TRQ) terhadap produk baja gulungan canai panas dan dingin. Namun, untuk kuota dalam batas TRQ (*in-quota*) diperlakukan penerapan system *automatic import licensing*. selain itu, Australia juga berkomitmen untuk menghapus seluruh pos tarif (100%) terhadap produk Indonesia saat perjanjian mulai berlaku.¹¹⁶

Putaran kedua belas perundingan IA-CEPA berlangsung di Jakarta pada Senin, 16 – Jumat, 20 Juli 2018. Putaran ini resmi dibuka oleh ketua delegasi Indonesia Dedy Saleh, bertempat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, dan menjadi tahap final dalam rangkaian negosiasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010. Sejumlah produk yang memiliki potensi ekspor yang tinggi ke pasar Australia, seperti produk otomotif, perangkat komunikasi (telepon), alat-alat kesehatan, ban, peralatan elektronik, furnitur, serta tekstil dan produk turunannya. Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaku usaha jasa di Indonesia memperoleh manfaat termasuk pengurangan berbagai hambatan perdagangan jasa, penguatan kerja sama teknologi, alih pengetahuan (*knowledge-sharing*), serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor strategis.¹¹⁷

¹¹⁶ Sella Panduarsa Gareta and Alviansyah Pasaribu, “Kemenperin Pacu Finalisasi Perundingan Indonesia-Australia CEPA,” *Antaraneews.com*, 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/715519/kemenperin-pacu-finalisasi-perundingan-indonesia-australia-cepa>.

¹¹⁷ Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, “Perundingan Putaran Ke-12 Indonesia-Australia CEPA,” Kementerian Perdagangan RI, 2018, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/perundingan-putaran-ke-12-indonesia-australia-cepa>.

Namun, sebelum memasuki perundingan kedua belas delegasi Indonesia dan Australia menggelar *preliminary meeting* pada 21-22 Juni 2018 untuk menyelaraskan posisi, menyusun strategi, dan mematangkan agenda utama terkait perdagangan barang dan kerja sama ekonomi. Pada pertemuan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Ni Made Ayu Marthini, selaku Direktur Perundingan Perdagangan Bilateral Kementerian Perdagangan, didampingi oleh Djatmiko Bris Witjaksono, selaku Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, dan kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Internasional (Sri Nastiti Budianti). Delegasi Indonesia turut diperkuat oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Bappenas. Sementara itu, delegasi Australia dipimpin oleh Andrew Martin dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia.¹¹⁸

Setelah menyelesaikan 12 putaran negosiasi, Indonesia dan Australia menandatangani IA-CEPA pada 4 Maret 2019. Namun, agar perjanjian tersebut bisa berlaku secara resmi, kedua negara perlu menyelesaikan prosedur domestik masing-masing, termasuk proses ratifikasi. Australia lebih dulu merampungkan ratifikasinya pada 26 November 2019, sementara Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui persetujuan DPR RI pada 6 Februari 2020 yang kemudian dituangkan

¹¹⁸ Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, "Preliminary Meeting Perundingan Putaran Ke-12 Indonesia-Australia CEPA," Kementerian Perdagangan RI, 2018, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/preliminary-meeting-perundingan-putaran-ke-12-indonesia-australia-cepa>.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan IA-CEPA.¹¹⁹ Setelah kedua negara menukarkan notifikasi diplomatik sebagai tanda bahwa seluruh persyaratan internal telah dipenuhi, IA-CEPA resmi berlaku pada 5 Juli 2020, atau 60 hari setelah penukaran notifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21.4 perjanjian. Dengan demikian, proses pemberlakuan IA-CEPA menunjukkan bahwa selain kesepakatan di meja perundingan, prosedur legal domestik dan persetujuan politik menjadi syarat mutlak agar sebuah perjanjian internasional dapat diimplementasikan secara efektif.¹²⁰

Gambar 2.3 Penandatanganan Perjanjian Kemitraan IA-CEPA



Sumber: Kemendag

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita bersama dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham menandatangani perjanjian IA-CEPA yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada 4 Maret 2019 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Dalam forum tersebut Menteri Perdagangan juga menguraikan bahwa produk-produk

¹¹⁹ Peraturan BPK, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020: Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement),” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/134563/uu-no-1-tahun-2020>.

¹²⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” (2019), https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/iacepa/persetujuan-kemitraan-ekonomi-komprehensif-indonesia-australia_compressed.pdf.

Indonesia yang berpotensi meningkat eksportnya adalah produk otomotif, khususnya mobil listrik dan hibrid. IA-CEPA memberikan persyaratan kualifikasi konten lokal (QVC) yang lebih mudah untuk kendaraan listrik dan hibrid asal Indonesia dibandingkan negara lainnya. Selain itu, produk-produk Indonesia yang berpotensi meningkat eksportnya yaitu kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, dan peralatan elektronik.¹²¹

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perjanjian IA-CEPA telah resmi disahkan di kedua negara dan berharap agar implementasi dari perjanjian IA-CEPA dapat segera dilaksanakan melalui program 100 hari implementasi IA-CEPA, sembari menambahkan “...*kedepannya hubungan ekonomi kedua negara secara komprehensif akan lebih maju dan harus lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat kedua negara*”. Beberapa programnya mulai dari pelaksanaan *Australia Business Week* di Indonesia yang akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan Australia, kunjungan sejumlah *major private investors* Australia ke Indonesia, pendanaan proyek infrastruktur, hingga kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.¹²²

¹²¹ Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, “Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/penandatanganan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-indonesia-australia>.

¹²² Humas Kemensetneg, “Selesai Diratifikasi, IA-CEPA Perkuat Ekonomi Indonesia-Australia,” Kementerian PANRB, 2020, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/selesai-diratifikasi-ia-cepa-perkuat-ekonomi-indonesia-australia>.